

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* BERDASARKAN
INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN (IKK)
PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI INDONESIA**

(Tesis)

Oleh

MUHAMMAD SIDIQ



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNGG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Abstrak

Analisis *Flypaper Effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten/Kota di Indonesia

Oleh:

Muhammad Sidiq

Desentralisasi fiskal sebagai salah satu implementasi kebijakan otonomi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sendiri secara maksimal, dampaknya kebutuhan dana yang cukup besar sebagai penopang menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana tersebut berasal dari PAD dan Transfer pemerintah pusat, salah satu dana transfer tersebut adalah DAU yang merupakan *unconditional grant*.

Penelitian ini melihat sumber dana manakah (PAD dan DAU) yang lebih berpengaruh terhadap belanja daerah (apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak) berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). IKK dihitung berdasarkan model Bappenas 2003, dan untuk melihat *flypaper effect* menggunakan model regresi berganda (*multiple regression*) data panel. Sampel yang dianalisis sebanyak 2.405 (kabupaten/kota se-Indonesia) periode 2010 – 2014.

Hasil penelitian didapat, kabupaten/kota IKK tinggi sebanyak 153, kabupaten/kota IKK sedang 151, dan kabupaten/kota IKK rendah sebanyak 147. Dan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, pengaruh DAU lebih besar dibanding PAD baik pada daerah dengan IKK tinggi, sedang maupun rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *flypaper effect* terjadi diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Kata kunci: IKK, Belanja Daerah (BD), PAD, DAU, *flypaper effect*.

Abstract

Analysis *Flypaper Effect* Based Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) in the Regency and City in Indonesia

By
Muhammad Sidiq

Fiscal decentralization as one of the implementation of autonomy policy provides an opportunity for the region to manage and develop the potential of their own area to the fullest. The direct impact of the implementation of autonomy and decentralization is the need of substantial funds for support to independence of local governments. Source of funding comes from the local government revenue (PAD) and central government transfers funds, which one of transfer funds is DAU (an unconditional grant).

This study uses analysis Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) model based on Bappenas 2003 and multiple regression model to see *flypaper effect*. Samples were analyzed 2,405 (regency/cities in Indonesia) in the period 2010 - 2014. The purpose of this research to find out whether the *flypaper effect* occur in regency /cities in Indonesia based on Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

From the anylisis finds that the regency/city with high IKK as 153, regency /cities with medium IKK as much as 151 , and regency/city with low IKK as 147. And the results of the regression testing shows that the DAU and PAD having an effect positively significant to regional expenditure, the influence of DAU is greater than the PAD well in areas with high IKK, medium or low . The findings show *flypaper effecct* occurred throughout the districts/cities in Indonesia.

Keywords: IKK, Regional Expenditure, DAU, PAD, *Flypaper effect*

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* BERDASARKAN
INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN (IKK)
PADA KABUPATEN DAN KOTA
DI INDONESIA**

Oleh

MUHAMMAD SIDIQ

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Pada

Program Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **ANALISIS FLYPAPER EFFECT
BERDASARKAN INDEKS KEMAMPUAN
KEUANGAN (IKK) PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD SIDIQ**

No. Pokok Mahasiswa : **1421031029**

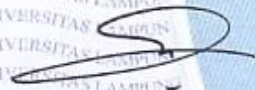
Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

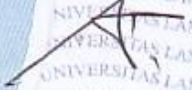
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



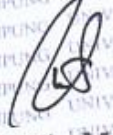
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP.19700817.199703 2 002


Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.
NIP.19580919.199501 1 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Susi Sarumpaet, M.B.A., Ph.D., Akt.
NIP. 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**
Ketua

: Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt.

Sekretaris

: Kiagus Andi, S.E., M.Si, Akt.

Penguji Utama : Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

Wakil Dekan Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian, 16 Mei 2016.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “**Analisis *Flypaper Effect* berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam akademik atau yang disebut plagiatisme;
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan ketidak benaran, maka Saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya sesuai hukum yang berlaku.

Bandarlampung, Juni 2016

Pembuat Pernyataan,



Muhammad Sidiq
NIP.1421031029

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 16 Desember 1982 yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Samiran, Alm dan Ibu Manisem.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Sriwijaya Sukarame Bandar Lampung, pendidikan SD di SDN I Sukarame Bandar Lampung, kemudian SLTPN 21 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 1999, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Bandarlampung yang diselesaikan tahun 2001, setelah itu penulis melanjutkan Diploma I Teknokrat dan Serata I Ekonomi Pembangunan UNILA melalui jalur SMPB tahun 2002, selama menjadi mahasiswa penulis aktif di SENAT tahun 2003-2004.

Penulis bekerja di Inspektorat Kota Metro sejak tahun 2008 sebagai Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah (P2UPD), kemudian ditahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Univesitas Lampung melalui jalur Bea Siswa STAR BPKP.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kupersembahkan karya kecil ku ini kepada:

Ibu dan Bapak tercinta

Istriku

Kakak dan Adikku

Saudara dan sahabat-sahabatku dan

Almamaterku

MOTTO

Bahagia itu sederhana Bersyukur atas apa yang dikaruniakan ALLAH dan bermanfaat bagi Orang Lain.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul “**Analisis Flypaper Effect berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sartia Bangsawan, S.E, M.Si., selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D., Akt selaku Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan waktunya yang luar biasa selama penyusunan tesis;
4. Bapak Kiagus Andi, S.E., M.Si., Akt.selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan dukungan, saran dan waktunya selama penyusunan tesis
5. Ibu Dr. Marselina, S.E., M.P.M selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis.
6. Bapak Usep Syaifudin, S.E., M.Si selaku pembahas II yang juga telah memberikan saran dan masukan selama penyusunan Tesis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Akuntansi yang selama kuliah telah memberikan Ilmu dan berbagi Pengalaman yang sangat berharga.
8. Pengelola dan karyawan serta karyawan Mas Ayyin, Mas Andre dkk yang telah ikut meembantu kelancaran perkuliahan.

9. Alm Bapak-ku (Samiran) yang selalu kukenang nasihat dan perjuangan-Mu, Ibu Ku tercinta (Ibu Manisem) yang sangat perhatian dan senantiasa mendoakan Anak-anak-Nya
10. Instriku tercinta Atie Saptyawatie, S.Psi yang selalu menemani dalam penyusunan Tesis;
11. Kakak ku Winarni, S.Pd dan Adik ku Neni Susanti S,T. serta Anisa Septiana yang telah memberi dorongan dan dukungan
12. Teman-teman Magister Ilmu Akuntansi STAR BPKP Batch I, Pak Acep, Mas Sukani, Uda Zai, Reny Astuti, Mega, Yuk Sadu, Juwe, Firda, Anifa Mb. Ovi, Wahdani, Teh Lilis, Bang Fadri, Mas Windy, Feria, Nani, Mb Endang, Wowon, Nurul, Desi, Dewi, Mb. Heni, Mas Narso Alm, May Saroh dan Bernadeta yang selalu kompak dalam segala hal, terimakasih untuk suka duka serta kebersamaannya.
13. Keluarga besar Inspektorat Kota Metro jayalah terus fungsional P2UPD dan AUDITOR.
14. Rakan-rekan lainnya Tiara, S.E. M.Si, Mas Indra BKD dkk yang ikut mendukung selama kuliah di Magister Ilmu Akuntansi.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah dan Ridho-Nya kepada kita semua...Ammiin...

Bandarlampung, Juni 2016

Penulis,

Muhammad Sidiq

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Teori Keagenan	11
2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah	12
2.1.3. <i>Flypaper effect</i>	13
2.1.4. Transfer	15
Dana Alokasi Umum (DAU)	16
2.1.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.6. Belanja Daerah.....	18
2.2. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).....	18
2.3. Penelitian Terdahulu	19
2.4. Pengembangan Hipotesis	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis Penelitian	28
3.2. Populasi, Sampel dan Sumber Data	28
3.2.1. Populasi Penelitian	28
3.2.2. Sampel dan Sumber Data.....	28
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	29
3.4. Alat Analisis.....	32
3.4.1 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).....	32
3.3.2 Regresi Data Panel	35
3.3.3 Asumsi Klasik	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi sampel dan variabel Penelitian.....	39
4.1.1 Deskripsi Sampel Penelitian	39
4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	40
4.1.3 Deskriptif peran (share) dan pertumbuhan (growth)	42
4.2. Trend Kontribusi PAD terhadap APBD.....	43
4.2. Pemetaan kemampuan keuangan berdasarkan IKK.....	46
4.3. Analisis Deskriptif dan Regresi data Panel	49
4.3.1 Deskriptif Regresi Panel berdasarkan IKK	49
4.3.2 Analisis Regresi Data Panel.....	51
4.3.2.1 Pemilihan Model (<i>uji chow</i>)	51
4.3.2.2 Pemilihan Model (<i>Hausman tes</i>).....	52
4.3.2.2 Asumsi Klasik	54
4.4. Uji Hipotesis	56
4.4.1 Uji Hipotesis 1	56
4.4.2 Uji Hipotesis 2	57
4.4.3 Uji Hipotesis 3	59
4.5. Pembahasan.....	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN..... 66

5.1. Simpulan	66
5.2. Sasaran.....	67

DAFTARPUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Trend komposisi pendapatan Daerah 2010-2014.....	3
Tabel 2.1.	Klasifikasi IKK	19
Tabel 2.2.	Mapping Penelitian	20
Tabel 3.1.	Kriteria Sampel	29
Tabel 4.1.	Sampel penelitian	39
Tabel 4.2.	Deskriptif Belanja Daerah.....	40
Tabel 4.3.	Deskriptif PAD	41
Tabel 4.4.	Deskriptif DAU	41
Tabel 4.5.	Deskriptif Share dan Growth	42
Tabel 4.6.	Trend kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD IKK tinggi.....	44
Tabel 4.7.	Trend kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD IKK sedang....	45
Tabel 4.8.	Trend kontribusi rata-rata PAD terhadap APBD IKK rendah	46
Tabel 4.9.	Deskriptif IKK	47
Tabel 4.10	Deskriptif Regresi IKK Tinggi	49
Tabel 4.11	Deskriptif Regresi IKK Sedang	50
Tabel 4.12	Deskriptif Regresi IKK Rendah.....	51
Tabel 4.13	Pemilihan Model (uji chow)	52
Tabel 4.14	Hasil Uji Model Husman	53
Tabel 4.15.	Menguji Heterokedasitas.....	55
Tabel 4.16.	Regresi IKK Tinggi.....	56
Tabel 4.17.	Regresi IKK Sedang	58
Tabel 4.18.	Regresi IKK Rendah	59
Tabel 4.19.	Regresi Tanpa Belanja Pegawai.....	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Komposisi dana Transfer dalam APBN	4
Grafik 4.1	Trend Rata-rata PAD terhadap APBD daerah IKK tinggi.....	45
Grafik 4.2	Trend Rata-rata PAD terhadap APBD daerah IKK sedang.....	46
Grafik 4.4	Trend Rata-rata PAD terhadap APBD daerah IKK rendah.....	47
Grafik 4.5.	Pemetaan daerah IKK Tinggi	48
Grafik 4.6.	Pemetaan daerah IKK Sedang	49
Grafik 4.7.	Pemetaan daerah IKK Rendah.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat, seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

Kebijakan tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, kebijakan tersebut diatur dalam UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 23/2014, dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah dengan UU 33/2004 yang menjadi landasan otonomi, kemudian dijelaskan lebih jauh pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), yang kemudian dipandu dengan Permendagri No. 21/2011.

Permendagri No. 21/2011 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelola daerah, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, dan laporan aliran kas. Dari Laporan APBD tersebut dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah daerah selama satu tahun fiskal.

Sumber dana dalam APBD mencakup dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat, hal ini tercantum dalam UU No. 33/2004 yang menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak. Disamping dana perimbangan tersebut dalam APBD, pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah, kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, dan merupakan kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (*revenue assignment*) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah (*expenditure assignment*) sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Tujuannya untuk menciptakan kondisi ideal dimana kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada.

Permasalahan kemudian yang timbul adalah pemerintah daerah terlihat lebih menggantungkan transfer untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Disaat transfer yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya transfer yang diperoleh tetap besar, sehingga besaran transfer meningkat ditahun berikutnya. Hal tersebut terlihat dari *trend* dana perimbangan secara nasional yang masih

dominan setiap tahunnya. Berikut ini tabel *trend* komposisi pendapatan daerah secara nasional:

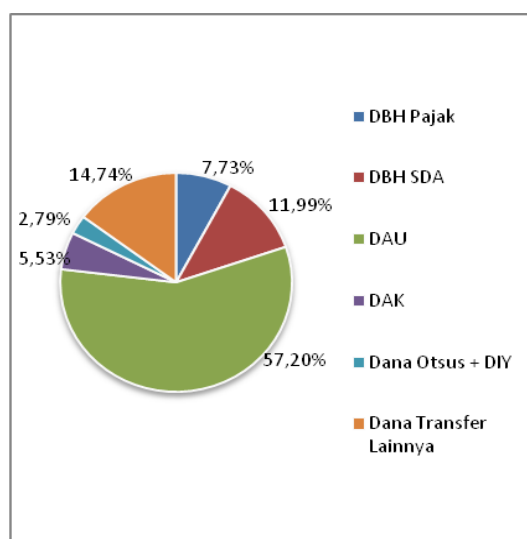
Tabel 1.1
Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010 – 2014
(Dalam milyar Rupiah)

Pendapatan Daerah	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
PAD	71.852	90.393	112.745	140.328	180.397
Dana perimbangan	292.281	327.368	380.984	433.213	482.221
Lain-lain enapatan yang sah	22.205	42.132	58.218	79.971	96.908

Sumber : Data APBD konsolidasi 2010 – 2014 pada deskripsi analisis APBD Depkeu 2014

Tabel 1.1 di atas menunjukkan dana perimbangan tahun 2011 meningkat 12 %, tahun 2012 meningkat 16,38%, tahun 2013 meningkat 11,32% dan tahun 2014 meningkat sebesar 13,35%, dan porsi terbesar dana perimbangan tahun 2014 dalam APBN adalah DAU yang ditunjukkan pada grafik dibawah ini:

Grafik 1.1
Komposisi dana transfer ke Daerah dalam APBN.



Sumber : DJPK yang disampaikan pada seminar ISEI FE Unila 2015

Grafik 1.1 menunjukkan DAU masih menjadi kontributor terbesar dana perimbangan khususnya pada daerah kabupaten/kota dengan persentase 57,20% dari APBN tahun 2014. DAU merupakan transfer tidak bersyarat (*unconditional grant*) dianggap lebih *flexibel* dalam penggunaannya, yang diharapkan dapat dialokasikan pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan investasi di daerah dan meningkatkan respon pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang disediakan seperti tujuan dari desentralisasi itu sendiri.

Kemudian memunculkan efek dalam peningkatan kontribusi publik terhadap PAD seperti dalam bentuk pajak yang juga meningkatnya kapasitas fiskal daerah, sehingga tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi pendorong peningkatan kemandirian daerah, justru direspon atau diperlakukan berbeda oleh daerah.

Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik dari transfer pusat maupun dari pendapatan daerahnya sendiri merupakan objek yang telah diteliti dan dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai pendekatan. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pusat secara simetris dan tidak simetris (Gamkhar dan Oates, 1996) dalam Abdullah dan Halim (2003). Menurut Alderete (2004) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat *spekulasi* bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer tersebut secara *asimetris*.

Kuncoro (2007) menemukan bahwa perubahan besaran transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten menimbulkan perilaku *asimetris* pemerintah kota dan kabupaten dalam penggunaan dana transfer yang diterimanya tersebut. Kuncoro menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah, terutama belanja operasional. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan pendapatan asli daerah.

Hubungan pengaruh dari transfer dana antar pemerintah dan pendapatan daerah terhadap kebijakan belanja daerah dalam dunia akademis dikenal sebagai *flypaper effect*. Beberapa peneliti menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagai *Flypaper effect*, yaitu respon belanja pemerintah daerah yang berbeda untuk sumber dana dari transfer pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah/ PAD. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah lebih besar terhadap pendapatan daerah, kondisi tersebut disebut sebagai *flypaper effect* (Oates, 1999) dalam Abdullah dan Halim (2003).

Selain Kuncoro, Abdullah dan Halim (2003) menguji *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali menyatakan bahwa DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap belanja daerah periode t, namun ketika diuji pengaruh Dana Alokasi Umum t (DAU t) dan Pendapatan Asli Daerah t (PAD t) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t (BD t), hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun menurut Abdullah dan Halim (2003) hasil penelitian tersebut tidak dapat disamakan untuk seluruh wilayah diseluruh Indonesia, karena pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Kurnia dan Ananda (2013) mengatakan setiap daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi seharusnya memicu timbulnya pendapatan asli daerah seperti melalui pajak dan retribusi, dan pendapatan asli daerah inilah yang seharusnya berjalan mengimbangi transfer pusat. Apabila siklus ini berjalan dengan baik maka seharusnya kapasitas dan kebutuhan fiskal daerah dapat berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu Kurnia dan Ananda (2013) melakukan penelitian tentang *flypaper effect* yang berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di Jawa Timur, hasil penelitian menunjukkan Daerah yang memiliki IKK yang tinggi tidak terjadi *flypaper effect* sedangkan daerah yang kondisi IKK rendah terjadi *flypaper effect*.

Kajian tentang Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) itu sendiri telah diteliti oleh Bappenas (2003) dengan mengamati Indeks *Growth* PAD, Indeks *Share* PAD (rasio antara PAD dan Belanja Daerah) dan Indeks *Elastisitas* (rasio pertumbuhan

PAD dan pertumbuhan PDRB), yang mana ketiga hal tersebut mencerminkan kapasitas dan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis *Flypaper Effect* Berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam studi ini, paling tidak ada dua hal penting yang melatarbelakangi keinginan untuk melihat fenomena *Flypaper Effect* di Kabupaten/kota di Indonesia.

Pertama, perkembangan pemekaran wilayah Indonesia sejak otonomi daerah tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 sangat pesat, yang terdiri dari 34 Provinsi, 419 kabupaten, dan 93 Kota. Dan setiap daerah memiliki kondisi, karakteristik ekonomi dan geografis yang bervariasi serta kemampuan keuangan yang berbeda-beda.

Kedua, adanya *research gap* yang terjadi pada berbagai studi terdahulu tentang fenomena *Flypaper Effect*. Pramuka (2010) mengatakan bahwa *Flypaper Effect* tidak ditemukan di kabupaten/kota di Jawa, yang menunjukkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka. Hasil tersebut tidak konsisten dengan Abdullah dan Halim (2003) yang mengatakan bahwa *flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali, kemudian temuan Kurnia dan Ananda (2013) seperti pada latar belakang penelitian ini. Maka disusunlah pertanyaan penelitian yang akan diajukan sebagai berikut :

1. Apakah *Flypaper Effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi;
2. Apakah *Flypaper Effect* terjadi pada pada kabupaten/kota se-Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang;
3. Apakah *Flypaper Effect* terjadi pada pada kabupaten/kota se-Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi periode 2010 sampai dengan 2014?
2. Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang periode 2010 sampai dengan 2014?
3. Untuk mengetahui apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah periode 2010 sampai dengan 2014?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar tentang kondisi kemampuan keuangan yang dilihat dari Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten dan Kota di Indonesia;

2. Dapat dijadikan informasi tentang perbedaan fenomena *Flypaper Effect* antara Kabupaten dan Kota di Indonesia berdasarkan klasifikasi Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori *prinsipal-agen* menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agent*) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi.

Dalam kaitannya dengan isu penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*, dan peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara *principal-agent*. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah:

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan

diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk diberhentikan (UU32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan kepala daerah berakhir.

2. UU No. 33/2004 yang menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (sebagai *principal*) akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak kepada Pemerintah Daerah (sebagai *agent*).

Tujuan dari dibentuknya peraturan-peraturan tersebut merupakan implikasi dari adanya era otonomi daerah, yaitu untuk pemerataan pembangunan. Tetapi pada praktiknya sebagian besar daerah menjadikan transfer dari *principal* tersebut sebagai sumber dana utama bagi *agent* untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Kenyataan inilah yang menimbulkan respon asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan transfer yang cenderung meningkat.

2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah versi Keynes identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G$ merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan Pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran Pemerintah. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1997). Menurut Keynes untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran Pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.

Keynes juga mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut kecenderungan mengkonsumsi ($MPC = Marginal Propensity to Consume$). Semakin besar MPC semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas kecenderungan pengeluaran atau belanja seharusnya dilihat dari jumlah pendapatan. Karena komposisi pendapatan dalam struktur APBD terdapat tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah, maka ketergantungan pendapatan dalam struktur APBD

melalui bantuan transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat kemungkinan besar akan terjadi. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat melalui Undang-undang menjamin adanya dana transfer, pada hal seharusnya bantuan transfer tersebut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ditahun-tahun berikutnya, namun menurut Kuncoro (2007) peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah, terutama belanja operasional. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi penurunan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.3 *Flypaper Effect*

Istilah *flypaper effect* sendiri timbul dari pemikiran Okun (1930) pada Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan “*money sticks where it hits*”. Sejauh ini, belum ada padanan kata *flypaper effect* dalam bahasa Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan.

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa ketika respon

Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dari pemerintah pusat dibanding Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka kondisi tersebut disebut dengan *flypaper effect*.

Menurut Maimunah (2006), *flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak/boros dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diproksikan dengan DAU (dana alokasi umum) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD (pendapatan asli daerah).

Jadi *flypaper effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/*grants* atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau *unconditional grants* daripada pendapatan asli dari daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan pemborosan dalam Belanja Daerah.

Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Kuncoro (2007)).

2.1.4 Transfer

Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Dasar hukum transfer adalah UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Jenis-jenis dana transfer pusat meliputi transfer dana perimbangan dan transfer Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

a. Transfer Dana Perimbangan meliputi:

- 1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak;
- 2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
- 3) Transfer Dana Alokasi Umum; dan
- 4) Transfer Dana Alokasi Khusus.

b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian meliputi:

- 1) Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;
- 2) Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam; dan
- 3) Transfer Dana Penyesuaian

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dan merupakan *unconditional grant* dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Abdullah dan Halim, 2003).

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Permendagri 26/2006 memberikan prioritas pemanfaatan dana alokasi umum *pertama* untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai serta kesejahteraan pegawai, *kedua* untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta *ketiga* untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapata daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

- 1) pajak daerah,
- 2) retribusi daerah,

- 3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- 4) lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.1.6 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Jenis-jenis belanja:

a. Belanja tidak langsung

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

b. Belanja Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan

2.2 Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah, Bappenas (2003) menyatakan bahwa salah satu cara melihat peta kemampuan keuangan daerah adalah melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah satu unsur dari analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis penerimaan. Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya. Secara matematik, Indeks Kemampuan Keuangan adalah rata-rata penjumlahan dari *indeks growth* PAD, *indeks share* (PAD terhadap APBD) dan *indeks elastisitas* (PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi-PDRB).

Indek Kemampuan Keuangan (IKK) dibedakan melalui *range* IKK tertinggi, IKK sedang dan IKK terendah, beerikut nilai *range* klasifikasi IKK:

Tabel 2.1
Kalsifikasi Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 - ,0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber Bappenas (2003)

2.3. Penelitian Terdahulu

- a. Maimunah (2006) *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatra pada Simposium Nasional Akuntansi. Hasil penelitan besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai Belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Sumatera. Ketiga tidak terdapat perbedaan terjadinya *Flypaper Effect* baik pada daerah yang PAD-nya

rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di kabupaten/kota pulau Sumatera.

- b. Pramuka (2010) *Flypaper Effect* pada Pengeluaran Pemerintah di Jawa oleh pada jurnal ekonomi. Hasilnya menyimpulkan tidak terjadinya *Flypaper Effect* pada Kabupaten/kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah.
- c. Eka Dedi Kurnia dan Fajri Ananda (2013) Analisis *Flypaper Effect* berdasarkan pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/kota di Jawa Timur) pada Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Vol I No.. Hasil penelitian menunjukkan *Flypaper Effect* terjadi di Kabupaten/kota di Jawa Timur pada daerah yang mempunyai kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah sedangkan pada daerah yang memiliki kemampan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak terjadi *Flypaper Effect*.

Untuk melihat perbedaan rencana penelitian dengan beberapa penelitian terdahulu mengenai *Flypaper Effect* dapat dilihat pada tabel mapping penelitian di bawah ini:

Tabel 2.2
Mapping Penelitian

No	Nama Peneliti/Tahun	Metode Analisis	Hasil	Perbedaan
1	Syukriy Abdullah dan Abdul Halim Jurnal Ekonomi STEI. No. 2, Tahun XIII/25.	Analisis Regresi Berganda	<i>Flypaper Effect</i> terjadi untuk prediksi dengan lag, tetapi tidak untuk tanpa lag	1. Sampel penelitian <i>Syukriy Abdullah dan Abdul Halim</i> : Kabupaten/kota Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur dan Bali; <i>Rencana Penelitian</i> : Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas daerah

				<p>degan IKK tinggi, sedang dan rendah</p> <p>2. Isu Penelitian <i>Syukriy Abdulah dan Abdul Halim</i> Melihat <i>Flypaper Effect</i> dengan mengambap setiap daerah memiliki kemampuan yang sama</p> <p><i>Rencana Penelitian</i> Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Terdapat perbedaaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kreteria umur Pemerintahan dan kreteria IKK</p>
2	Mutiara Maimunah (SNA Padang 2006)	Analisis Regresi Berganda Dan Uji Beda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah 2. Terjadi <i>Flypaper Effect</i> 3. tidak terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampel Penelitian <i>Mutiara Maimunah (2006)</i> : Kabupaten/kota se-Sumatra; <i>Rencana Penelitian</i> : Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas IKK tinggi, sedang dan rendah. 2 Isu Penelitian <i>Maimunah (2006)</i> Terjadi <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/kota se-Sumatra dan terdapat perbedaaan <i>Flypaper Effect</i> pada Kabupaten/kota yang PAD Tinggi dan PAD rendah <p><i>Rencana Penelitian</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan kuangan

				<p>yang berbeda, sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).</p> <p>- Terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kriteria umur Pemerintahan dan Perbedaan IKK.</p>
3	Bambang Agus Pramuka (2010) Jurnal Ekonomi Vol 11 No.1 Hlm 1-12	Analisis Regresi Berganda	<i>Flypaper Effect</i> tidak ditemukan, yang menyiratkan bahwa pemerintah setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari anggaran mereka	<p>1. Sampel Penelitian</p> <p><i>Pramuka (2010)</i></p> <p>Kabupaten/kota di Pulau Jawa</p> <p><i>Rencana Penelitian :</i></p> <p>Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas daerah IKK tinggi, sedang dan rendah.</p> <p>2. Isu Penelitian</p> <p><i>Pramuka (2010)</i></p> <p>Melihat <i>Flypaper Effect</i> dengan menganggap setiap daerah memiliki kemampuan yang sama</p> <p><i>Rencana Penelitian</i></p> <p>- Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK).</p> <p>- Terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kriteria umur Pemerintahan dan Perbedaan IKK..</p>
4	Ria Aulia Ramadhona (Tesis Unila 2013)	Analisis Regresi Berganda	1. Terjadi <i>falypaper effect</i> di kabupaten kota se-Indonesia	<p>1. Sampel Penelitian</p> <p><i>Ramadhona (2013)</i></p>

			<p>2. Terjadinya <i>Flypaper Effect</i> ditemukan paling besar pada daerah inti pemekaran</p>	<p>Kabupaten/kota se-Indonesia yang mengalami pemekaran dan tidak mengalami pemekaran.</p> <p><i>Rencana Penelitian :</i></p> <p>Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas daerah IKK tinggi, sedang dan rendah.</p> <p>2 . Isu Penelitian</p> <p><i>Ria Aulia Ramadhona 2013</i></p> <p>Melihat <i>Flypaper Effect</i> dengan menganggap setiap daerah memiliki kemampuan yang sama.</p> <p>Terdapat perbedaan <i>Flypaper Effect</i> antara Daerah yang mengalami pemekaran dan tidak</p> <p><i>Rencana Penelitian</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). - Terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kriteria umur Pemerintahan dan Perbedaan IKK.
5	Lestari L F Simanjuntak, Ahmad Subeki, Ika Sesti Ferina, Hasni Yusriant (<i>The 14th FourA</i>	Analisis Regresi Berganda	DAU and PAD have a significant impact on Regional Expenditure. It indicated that the <i>Flypaper Effect</i> was	Sampel : Districts and Cities in South Sumatera <i>Sampel Rencana Penelitian</i>

	<i>Annual Conference 2013, Penang, Malaysia, October 28-30, 2013</i>		not found neither in DAU nor in PAD's influence to Regional Expenditure in Districts and Cities in South Sumatera	Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas daerah sebelum otonom dengan daerah setelah otonom yang memiliki umur pemerintah lebih 10 tahun dan kurang 10 tahun.
6	Dedy K (Dirjen Pengembangan Otda Bappenas 2003)	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> PAD di kawasan barat Indonesia mempunyai kinerja keuangan yang baik dibanding kawasan Indonesia Timur Provinsi yang mempunyai Sumber Alam melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik 	<p>1. Sampel Penelitian <i>Dedi K</i> : Provinsi se Indonesia</p> <p><i>Rencana Penelitian</i> :</p> <p>Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang dibedakan atas daerah sebelum otonom dengan daerah setelah otonom yang memiliki umur pemerintah lebih 10 tahun dan kurang 10 tahun.</p> <p>2. Isu Penelitian</p> <p><i>Dedi K</i> : terdapat perbedaan Indek Kemampuan Keuangan (IKK) seteiap Provinsi</p> <p><i>Rencana Penelitian</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan kuangan yang berbeda, sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kreteria umur Pemerintahan dan Perbedaan IKK.
7.	Eka Dedi Kurnia dan Fajri Ananda (2013) Jurnal ilmiah Universitas Brawijaya Vol.I No.2	Analisis Regresi Berganda dan Uji Beda	1. Terjadi Flypaper Effecr di Kabupaten/kota di Jawa Timur pada daerah yang memiliki Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan	<p>1. Sampel Penelitian <i>Eka Dedi Kurnia</i> : Kabupaten/kota di Jawa Timur.</p> <p><i>Rencana Penelitian</i> : Kabupeten Kota se Indeonesia dengan degan membedakan</p>

			<p>ekonomi yang rendah.</p> <p>2. Tidak terjadi Flypaper Effect di Kabupaten/kota di Jawa Timur pada daerah yang memiliki Indeks Kemampuan Keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi</p>	<p>daerah dengan IKK tinggi, sedang dan rendah</p> <p>2. Isu Penelitian <i>Eka Dedi Kurnia</i> : terdapat perbedaan <i>Flypaper Effect</i> pada daerah yang memiliki Kemampuan keuangandan Perubahan Ekonomi setiap kuadran</p> <p><i>Rencana Penelitian</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganggap setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda, sehingga peneliti memetakan terlebih dahulu kemampuan daerah berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). - Terdapat perbedaan terjadinya <i>Flypaper Effect</i> antara daerah dengan dengan kriteria umur Pemerintahan dan Perbedaan IKK
--	--	--	---	--

2.4. Pengembangan Hipotesis

Oates (1999) dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2003) yaitu pada pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali. Hasil penelitian pada kabupaten/kota di

Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan *lag* maupun tanpa *lag*. Ketika tanpa menggunakan *lag*, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat daripada DAU, tetapi dengan digunakan *lag*, pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa stimulus untuk melakukan Belanja Daerah pada tahun t dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat yang diterima daerah periode $t-1$ pada Kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, kemudian Abdullah dan Halim (2003) menyatakan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota di luar Jawa-Bali.

Sementara itu Kurnia dan Ananda (2013) mencoba meneliti *flypaper effect* dengan memetakan perbedaan kemampuan keuangan pada kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), dalam hal ini perhitungan IKK telah dipublikasikan oleh Bappenas (2003). Hasil penelitian menyebutkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur dengan IKK Tinggi tidak terjadi *flypaper effect* sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Timur dengan IKK sedang dan rendah terjadi *flypaper effect*.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis memformulasikan hipotesis sebagai berikut:

H 1: Terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan IKK tinggi.

H 2: Terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan
IKK sedang.

H 3: Terjadi *flypaper effect* pada kabupaten/kota di Indonesia dengan
IKK rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut mengunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya.

3.2. Populasi, Sampel dan Sumber Data

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten / kota seluruh Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2014.

3.2.2. Sampel dan Sumber Data

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Peneliti ini menggunakan salah satu teknik *Non Probability Sampling* yakni teknik *purposive sampling* atau teknik pengambilan sampel penelitian dengan sengaja (tidak acak) menggunakan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sugiarto (2001) pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan

sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel adalah Kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Sampel
1	Kabupaten/kota di Indonesia yang tidak mengalami Pemekaran	194
2	Kabupaten/kota di Indonesia yang mengalami pemekaran (daerah Induk pemekaran)	109
3	Kabupaten/kota di Indonesia hasil pemekaran (daerah otonom baru)	211
	Total Kabupaten/kota s.d 2014	514

Sumber : Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri RI 2015 (Data di Olah)

Kemudian sampel pada Tabel 3.1 di atas dilihat kembali kelengkapan datanya tentang PAD, DAU dan Belanja Daerah Pada APBD yang telah dipublikasikan oleh Depkeu RI dalam situs www.djpk.go.id. Kemudian data PDRB Kabupaten/kota se-Indonesia periode tahun 2010-2014 diperoleh melalui BPS. Apabila daerah yang kelengkapan datanya kurang maka daerah tersebut dikeluarkan dari sampel.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

1. Variabel Terikat (Dependen)

Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi perhatian utama oleh peneliti. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD). Belanja Daerah (BD) merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006, belanja diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari *belanja pegawai; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; belanja bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga.*

2. Variabel Bebas (Independen)

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat pada kedua kesimpulan yaitu positif dan negatif. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

a. *Dana Alokasi Umum (DAU)* adalah transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan

horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Abdullah dan Halim, 2003).

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain dana bagi hasil dan dana alokasi khusus. Permendagri 26/2006 memberikan prioritas pemanfaatan dana alokasi umum *pertama* untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai serta kesejahteraan pegawai, *kedua* untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta *ketiga* untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat

- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah (UU No 33 3004). PAD dijadikan tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi.

Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah dapat pula dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar.

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Rumus perhitungan PAD adalah sebagai berikut:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

3.4. Alat Analisis

3.4.1. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Merupakan hasil rata-rata hitung dari indeks *share*, indeks *growth* dan indeks elastisitas terhadap jumlah tahun yang akan diteliti dengan untuk mengetahui kategori kemampuan keuangan suatu daerah dalam kategori rendah, mampu dan sangat mampu. Nilai indeks *share*, *growth* dan elastisitas, digunakan pengukuran dengan persamaan umum (Bappenas, 2003; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012).

- ***Growth PAD***

Growth PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth PAD* dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Growth PAD} = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100$$

PAD_t = PAD pada tahun tersebut

PAD_{t-1} = PAD pada tahun sebelumnya

- **Share PAD Terhadap Belanja Daerah (BD)**

Share mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu Kabupaten/kota.

$$\text{Share} = \frac{PAD}{\text{Belanja}}$$

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Belanja = Belanja Daerah

- **Elastisitas**

Elastisitas adalah persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Elastisitas mencerminkan perubahan kapasitas fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian.

Pertumbuhan Ekonomi (PE)

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini memakai proxy PDRB harga konstan.

Data mengenai PDRB kabupaten/kota se Indonesai didapat dari situs BPS.

Pertumbuhan ekonomi merupakan selisih PDB tahun t dengan PDB tahun sebelumnya atau t-1 dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Atau dapat dituliskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

Jadi ***Elastisitas*** diukur dengan :

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth}}{PE}$$

Elastisitas = Elastisitas PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi

Growth = Pertumbuhan PAD

PE = Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut, ditetapkan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing komponen.

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3}$$

Keterangan:

IKK = Indeks Kemampuan Keuangan

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD)

XE = Indeks Elastisitas (PAD terhadap PDRB)

XS = Indeks Share (PAD terhadap Belanja Daerah)

Indeks x = $\frac{(\text{Nilai x Hasil Pengukuran} - \text{Nilai x Kondisi Minimum})}{(\text{Nilai x Kondisi Maksimum} - \text{Nilai x Kondisi Minimum})}$

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) diklasifikaikan menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan spesifikasi nilai sebagai berikut:

Tabel .3.1
Kreteria Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK)	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 - ,0,43	Sedang
0,44 - 1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas (2003)

3.4.2. Analisis Regresi Panel

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) bahwa data panel merupakan gabungan antara data berkala (*time series*) dan data individual (*cross section*). Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu.

Keunggulan regresi data panel menurut Widarjono (2005) antara lain: *Pertama*, Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; *kedua*, Kemampuan mengontrol *heterogenitas* ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; *Ketiga*, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; *Keempat*, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (*multikolinieritas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; *Kelima*, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; *Keenam*, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Terdapat tigapendekatan model regresi data panel yaitu :

a. *Common Effect*

Metode *common effect* adalah metode yang hanya menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono,2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda.

b. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model *fixed effect* pada data panel mengasumsikan bahwa koefisien *slope* konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. Istilah *fixed effect* berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep β_0i berbeda antar individu namun intersep antar waktu sama (*time invariant*), sedangkan *slope* tetap sama antar individu dan antar waktu.

c. *Random Effect Model (REM)*

Pada model *random effect* digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh model *fixed effect*. Pendekatan model *fixed effect* dengan peubah semu (*dummy*) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari model.

Untuk memilih model *common effect* atau *fixed effect* maka dilakukan uji *Chow* melalui aplikasi *Eviews* dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Jika Chi Square $> 0,05$ = terima H_0

Jika Chi Square $< 0,05$ = Tolak H_0

Untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *random effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel maka dilakukan Uji *Hausman* dengan asumsi, yaitu:

H_0 : model mengikuti *Random Effect*

H_1 : model mengikuti *Fixed Effect*.

Jika Chi Square $> 0,05$ = terima H_0

Jika Chi Square $< 0,05$ = Tolak H_0

Penelitian ini menduga bahwa respon DAU lebih besar dari pada PAD terhadap Belanja Daerah (BD) dalam APBD kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan klasifikasi IKK. Adapun model regresi data panel sebagai berikut :

$$BD_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} = a + b_1 DAU_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} + b_2 PAD_{IKK-TINGGI\ 2010-2014} + e, \dots(1)$$

$$BD_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} = a + b_1 DAU_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} + b_2 PAD_{IKK-SEDANG\ 2010-2014} + e\dots(2)$$

$$BD_{IKK-RENDAH\ 2010-2014} = a + b_1 DAU_{IKK-RENDAH\ 2010-2014} + b_2 PAD_{IKK-RENDAH\ 2010-2014} + e. \dots(3)$$

Keterangan:

BD = Belanja Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = konstanta

b_1, b_2 = adalah koefisien regresi,

Analisa regresi data panel menggunakan bantuan aplikasi *Eviews8*. Dan untuk menentukan apakah terjadi *flypaper effect*, maka efek DAU terhadap BD dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD (Abdullah dan Halim 2003), dengan cara membandingkan *koefisien regresi* dan nilai *t-statistic* untuk masing-masing variabel. Apabila efek DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas (*degree of freedom*) dan lebih efisien (Hariyanto dkk, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode *cross section* maupun *time series*.

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik (Gujarati 2003). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam ShochrulR, Ajija, dkk. 2011).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran atau belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan sampel kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Pendapatan daerah dalam penelitian ini diproksikan oleh DAU dan PAD, sedangkan Belanja Daerah adalah jumlah total pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran yang terdapat dalam Laporan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel periode tahun 2010 s.d 2014 (5 tahun anggaran). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi;
2. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang;
3. *Flypaper effect* terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah;.

5.2. Saran

Pemerintah sebaiknya terus memantau perkembangan Daerah Otonom Baru (DOB) karena dari hasil pemetaan melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), daerah dengan IKK rendah paling banyak terjadi pada Daerah Otonom Baru

(DOB), dan hasil penelitian menunjukkan pada daerah tersebut terjadi *flypaper effect*, meskipun peneliti telah mengeluarkan belanja pegawai pada pos belanja tidak langsung akan tetapi *flypaper effect* tetap terjadi pada daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi, 2004, *Psikologi Belajar*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Acep, Yonny, 2010, *Menyusun Penelitian Tindakan Kelas*, Yogyakarta: Familia.
- Agus, Suprijono, 2009, *Cooperative Learning Tori & Aplikasi PAIKEM*, Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Ahmad, Tanzeh, 2004, *metode penelitian praktis*, Tulungagung: P3M.
- Akhyak, 2005, *Profil Pendidik Sukses*, Surabaya: elKAF.
- Anas, Sudijono, 2008, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asep, Jihad, 2008, Abdul Haris, *Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Asikin, Moch. 2004. *Dasar-dasar Proses Pembelajaran Matematika 1*, Semarang: Pend. Matematika FMIPA Unnes.
- Arie Sandi Setyono, 2006, *mathemagichis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Arif Furchan, 1992, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Bambang, Sutejo, *KTSP Strategis Analisis PTK*, Surabaya: Unesa University Press.
- Buchari, Alma, 2008, *Guru Profesional*, Bandung: Alfabeta.
- Budi, Isyanto, 2003, *Model Cooperative Learning*. t.t.p
- Conny, Semiawan, 2007, *Belajar dan Pembelajaran Pra sekolah dan Sekolah Dasar*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang.
- Dalyono, 2005, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Deddy, Mulyana, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Departemen, Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al - Qur'an.
- Dewi Nuharini, 2008, *Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk Kelas VIII Smp dan MTs*, Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Dwi, Sunar, Prasetyono, dkk, 2008, *Kupas Tuntas Matematika Dasar Untuk SMP Kelas VII-IX*, Jogjakarta: Think Jogjakarta.
- Etin, Solihatin, 2005, *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Erman, Suherman dkk, 2003, *Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Faisal, Sanapiyah, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- http://ipiems.com/index.php?option=com_content&view=article&id=33:kesuksesan-dalam-mencapai-prestasi-belajar&catid=1:halaman-depan&Itemid=36
- I Gak, Wardani, et al, 2000, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Depdiknas.
- Isjoni, 2010, *Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok*, Bandung: Alfabeta.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan social*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kuntjojo, 2010, *Model – Model Pembelajaran*, Kediri: Universitas Nesantara PGRI Kediri.
- Lexy J. Moloeng, 2002, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lisnawati, Simanjuntak, 1993, *Metode Mengajar Matematika*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marno, M. Idris, 2008, *Strategi & Metode Pengajaran*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Masriyah, 2010, *Modul Pembelajaran Inovatif & Asesmen Mata Pelajaran Matematika*, Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Moch. Masykur Ag, Abdul Halim Fatani, 2008, *Mathematical Intellegence*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Martinis, Yamin, 2008, *Taktik Mengembangkan Kemampuan Individual Siswa*, Surabaya: GP Press.
- Muflihah, 2008, *Kumpulan Lengkap Rumus Matematika SMP*, Jakarta : Puspa Swara, Anggota Ikapi.
- Miles, M.B & Huberman, 1992, *Analisis data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mulyasa, 2005, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, Sudjana, 1989, *pengertian Belajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana, Sudjana, 2006, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- NCTM, 1989, *Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics*, Reston, VA: NCTM.
- Nurhadi, 2007, *Pembelajaran Kontektual dan Penerapan dalam KBK*, Malang; Universitas Negeri Malang.
- Noeng, Muhajir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ngalim, Purwanto, 2006, *Prinsip – Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Pradnyo, wijayanti, 2002, *Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning)*.
- Paul, Suparno, *Metodologi Pembelajaran Fisika*, t.t.p
- Robert Bogdan, Steven J. Taylor, 1993, *Kualitatif Dasar-dasar Penelitian*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Robert, Slavin E, 1995, *cooperative learning: theory reseach and practice*, Boston: allyn and balon.
- Robert, Slavin, 2008, *Cooperative Learning Teori, Riset, dan praktik*. Terjemahan oleh Nurlita, Bandung: Nusa Media.
- Rochian, Wiratmadja, 1999, *Metode Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Depdikbut.

- Rusefendi, 1980, *Pengajaran Matematika untuk Sekolah Menengah*, Jakarta: Depdikbud
- Salah, Kaduri H, 2004, *Sejarah Matematika Klasik Dan Modern*, Surabaya: UAD PRESS.
- Sindhunata, 2000, *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Yogyakarta : Kanisius, Anggota IKAPI.
- Saifuddin, Azwar, 1987, *Tes Prestasi Fungsi dan Pengembangan Pengukuran Prestasi Belajar*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Syaiful, Bahri, Djamarah, 2008, *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaiful, Bahri, Djamarah, 2010, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Syaiful, Sagala, 2005, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 1998, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suharsimi, Arikunto, dkk, 2006, *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suharsimi, Arikunto, 2010, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara
- Trianto, 2007, *model-model Pembelajaran Inovative Berorientasi Konstruktivistik*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Trianto, 2010, *Panduan Lengkap Penelitian Tindakan Kelas*, Surabaya: Prestasi Pustakaraya.
- Yatim, Riyanto, 2001, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Anggota IKAPI.